

**PERANAN KOMUNIKASI SOSIAL UNTUK
 MENUMBUHKAN
 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BERKAMTIBMAS
 (Suatu Studi Pada Polsek Siak Hulu)
 Oleh : I Gusti Ngurah Agung Astika**

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan skripsi Mahasiswa PTIK Angkatan XXIII/WP ini terdiri dari bagian Pengantar 8 (delapan) halaman dan bab I (Pendahuluan) 27 (duapuluh tujuh) halaman.

Dalam catur wulan terakhir tahun 1989 Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta diwarnai oleh serangkaian tindak kekerasan dan penganiayaan antar pelajar dan bahkan juga antar mahasiswa, disela sejumlah korban yang berjatuhan akibat keberingasan pengemudi kendaraan bermotor serta modus operandi mutakhir dalam kasus pembunuhan, yang keseluruhannya telah berdampak keresahan yang serius. Sementara itu isu tentang keterbukaan, demokrasi, dan juga suksesi, juga muncul dengan visi-visi yang belum setolok ukur antara Pemerintah dengan kekuatan sosial/kekuatan politik, dan bahkan juga dengan DPR. Oleh sebab itu komuniti mahasiswa Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta telah tampil memberikan warna dinamika penalarannya

sesuai versi visinya sebagai isyarat belum padamnya tuntutan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi visi yang berbeda tersebut hampir selalu dianggap sebagai sikap oposisi, padahal dalam Demokrasi Pancasila institusi oposisi demikian tidak ada. Sebaliknya sikap dan penilaian Penguasa atas segala penalaran Mahasiswa yang berpenalaran berbeda itu oleh pihak Mahasiswa dianggap sebagai tidak terbuka dan tidak demokratis. Tak urung lahirlah friksi yang di antaranya telah menimbulkan krisis antara lain dengan adanya Peristiwa 5 Agustus 1989 di ITB Bandung. Sejumlah Pakar, juga Pakar Ilmu Komunikasi Sosial menilai bahwa friksi atau krisis yang sebenarnya tak perlu terjadi itu lebih berakar dari sebab yang klasik yakni telah timbulnya krisis komunikasi.

Dalam kaitan pendapat para Pakar tersebut maka dengan membaca skripsi berjudul "Peranan Komunikasi Sosial untuk menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Binkamtibmas" tahun 1988 maka para pembaca sangat diharapkan ditemukannya kunci-kun-

Disunting: Drs. Imam Soedjono, Anggota Redaksi Majalah Bhayangkara.

ci pas pemecahan friksi yang menghambat mekanisme Binkamtibmas. Pembacapun berharap adanya temuan serta pembuktian bahwa komunikasi sosial merupakan "senjata pamungkas" setiap petugas atau pembina Kamtibmas, tidak saja dalam memotivisir partisipasi masyarakat akan tetapi juga dalam mencapai sasaran Kamtibmas, yang diharapkan. Terutama dengan sample Polsek Siak Hulu, yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Agung Astika, saat menjadi Mahasiswa PTIK Angkatan XXIII/WP dengan judul tersebut di atas.

Keseluruhan skripsi terdiri dari 103 halaman terbagi dalam 5 (lima) bab, diawali kata pengantar serta daftar isi, dan sejumlah lampiran. Harapan membaca untuk memperoleh temuan pemacu partisipasi masyarakat tersebut menjadi semakin besar karena skripsi ini telah mendapatkan bimbingan materi dari seorang pakar Ilmu Kompos Universitas Indonesia yang juga Dosen Kompos di PTIK, Drs. M. Budyatna MA, dan skripsi ini telah pula dinyatakan memenuhi syarat untuk lulus oleh team penguji yang diketuai oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Drs. Djoenarsa, MA yang juga pakar Psikologi Sosial di PTIK.

KEADAAN UMUM KECAMATAN SIAK HULU DAN POTENSI POLRI POLSEK SIAK HULU

Bab II yang terdiri dari 9 (sembilan) halaman (halaman 28-36)

ini menjabarkan kondisi alamiah serta isian data statis yang penulis peroleh, terbagi dalam 3 (tiga) rincian sub-bab yakni: Situasi wilayah, situasi kriminalitas, dan potensi Polri Polsek Siak Hulu.

1. Situasi Wilayah.

Data analisis dari Kecamatan Siak Hulu dengan luas lahan 4.185 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 94.007 orang yang tersebar dalam 23 (duapuluh tiga) desa, dirinci menurut klasifikasi sebagai berikut:

- a. Menurut jenis kelamin dengan perbandingan laki-laki: wanita sebagai 48.641 jiwa (57,74%): 45.366 (42,26%).
- b. Menurut komposisi profesi: Petani 50%, Tani buruh 10%, Pedagang 20%, Pegawai/ABRI 10%, Lain-lain 10%.
- c. Tanpa prosentasi disebutkan bahwa mereka terdiri dari suku-suku bangsa: Melayu, Jawa, Minangkabau, Batak, Sunda, Bugis, Sakai/Bonai dengan sebutan penduduk asli bagi suku Melayu.
- d. Menurut sarana/gedung pendidikan umum dan agama: 1 Perguruan Tinggi (Universitas Riau), 4 SMA, 6 SMP, 21 SD, dan 9 Taman Kanak-kanak.
- e. Menurut jumlah tempat ibadah: 26 mesjid/musholla dan 4 gereja.
- f. Menurut organisasi kemasyarakatan: 16 LKMD, 16 PKK, 7 KUD,

d. Crime Clock:

Dari 57 perkara tahun 1985/1986, setiap kasus terjadi dalam 365 atau 6,4 hari; dan 57

dari 63 perkara tahun 1986/1987, setiap kasus terjadi dalam 365 atau 5,7 hari sekali.

63

e. Crime Clearance:

Kemampuan Polsek Siak Hulu untuk menyelesaikan perkara kejahatan per kurun waktu adalah sebagai berikut:

1) Tahun 1985—1986 29 kasus dari 57 kasus, crime clearancenya adalah 50,8%.

2) Tahun 1986—1987: 35 dari 63 kasus atau 55,5%.

Dari data tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa situasi kriminalitas di Polsek Siak Hulu relevan dengan situasi Kamtibmas, sehingga dinyatakan bahwa situasi Kamtibmas cukup terkendali.

3. Potensi Polri Polsek Siak Hulu.

Potensi Polri Polsek Siak Hulu yang berkedudukan di Kelurahan Simpang Tiga digambarkan sebagai berikut:

a. Personil: 37 orang terdiri dari 35 anggota Polri dan 2 PNS. Kepangkatan: 1 Perwira, 18 Bintara, dan 16 Tamtama. Pendidikan

1) Kepolisian: 1 Secapa, 18 Secaba, 16 Secatam.

2) Umum: 18 SMA, 16 SMP, 1 SD.

Asal Suku Bangsa Personil: 9 Melayu, 13 Minangkabau, 8 Batak, 2 Bugis, 1 Sunda, 3 Jawa, 1 Kerinci.

b. Sarana/Perlengkapan:

Polsek Siak Hulu memiliki sarana/perlengkapan penunjang tugas memadamkan terdiri dari:

Kaporalap, Persenjataan, Alat Komunikasi, dan Gedung Perkantoran serta Asrama.

Alat mobilitas tidak tercatat.

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAKSANAAN KOMUNIKASI SOSIAL YANG MENDUKUNG KAMTIBMAS.

Responden penguat analisis penulis terdiri dari:

1. Kelompok warga masyarakat yang dapat digolongkan sebagai Tokoh-tokoh Agama/Alim Ulama.

2. Kelompok warga masyarakat yang tergolong tokoh-tokoh yang seperti: Ketua Paguyuban, Ketua RT/RK, Ketua LKMD, dan Ketua Buruh.

3. Kelompok Kepala Desa/Kelurahan.

4. Kelompok Pendidik/Guru-guru Sekolah.

Dari kelompok pertama ditampilkan pendapat-pendapat dari HAJI MUKHTAR LUFTI di Desa Simpang Tiga, MAKFUL GANI

BA di Desa Tangkerang, ALI ABDULLAH di Desa Kasihan, KADARISMAN THALIB di Desa Teratak Buluh, dan NURDIN SANI dari Desa Rejosari.

Dari kelompok kedua digelar pendapat-pendapat dari: Purnawirawan Polri/Ketua suatu Paguyuban di Desa Tampan bernama Utomo Parmadi, Ketua Buruh Pasar di Desa Tangkerang bernama Bakri, Ketua LKMD Desa Simpang Tiga bernama Anin Rahman, Ketua Keamanan Simpang Tiga bernama Abu Supandi, Purnawirawan TNI-AD bernama Sukardi di Desa Sidomulyo, dan Ketua RK II Desa Taratak Buluh bernama Makmūn.

Dari kelompok ketiga diketegahkan masukan tentang Binkamtibmas sebagai berikut: Purnawirawan TNI-AU Sidik Sutanto selaku Kepala Desa Simpang Tiga, Haji As'ary S. selaku Kepala Desa Rejosari, Kepala Desa Muda Teratak Buluh bernama Bakhtiar Thalib, dan Kepala Desa Kasikan Nurdin Sani.

Dari kelompok keempat ditampikan pendapat-pendapat dari: Nasrun Siregar BA yang Kepala SMAN Simpang Tiga, dan juga Kepala SMA IV Pekanbaru.

Nara sumber keempat kelompok yang berjumlah kurang dari 20 (duapuluh) orang tersebut berbicara secara umum perihal:

— Pernah tidaknya aparat Polri bertatap muka tentang Kamtibmas.

- Sering tidaknya mereka itu ikut berbicara tentang Kamtibmas berikut pembinaan, penanganan, penangkalan dan pencegahan dampak negatif kemajuan atau modernisasi di Siak Hulu.
- Sudah ada atau belum adanya Siskamling/Siskamswakarsa.
- Kesulitan menanggulangi masalah mabuk minuman keras dan perkelahian/penganiayaan; dan dari lingkungan alamiah adanya gangguan satwa liar.
- Bahwa masing-masing dengan atau tanpa Tokoh/Pejabat Lingkungan yang terkait belum secara sistematis menangani gangguan Kamtibmas secara konseptional; juga komunikasi integral dengan jajaran vertikal serta horizontal guna mendukung Kamtibmas masih belum dilaksanakan secara eksplisit tajam dan mengarah.

FAKTA-FAKTA TENTANG KOMUNIKASI SOSIAL PADA POLSEK SIAK HULU

Bab ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab yaitu:

1. Hubungan Polri dan Masyarakat di Polsek Siak Hulu.
2. Pelaksanaan Komunikasi Sosial ABRI.
3. Pelaksanaan Komunikasi Sosial dalam Mendukung Kamtib di Desa.
4. Peranan Komunikasi Sosial dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat.

5. Bentuk Komunikasi yang Efektif dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Hubungan Polri dan Masyarakat di Polsek Siak Hulu.

Dalam kedudukannya sebagai organ dan fungsi maka Polri Polsek Siak Hulu telah mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat:

- Dalam wujud Sistem Sumbang Warga (Warga Desa/Kelurahan).
- Dalam wujud Sistem Sumbang Desa.
- Dalam menyadarkan masyarakat bahwa tugas menangani Kamtibmas adalah tugas kita bersama seluruh warganegara RI.

Dari ketiga butir kegiatan tersebut timbullah keluaran yang dijabarkan dalam:

- Bagaimana sikap Masyarakat terhadap Polisi.

Dari sikap dan tingkah laku Polisi yang sopan dan dewasa, yang saling menghargai dan menghormati, yang tegas dan berpenampilan yang mantap, dan lain-lain sikap yang mengatasi masalah teknis segala gangguan Kamtibmas, telah melahirkan respon positif dan simpati terhadap kehadiran Polri. Kehadiran Polisi terlihat diperlukan. Di lain pihak sikap Polisi yang masih sering "over-acting" dengan bergaya pamer kekuasaan/senjata api dan lain-lain telah berdampak Polisi

dijauhi rakyat. Masyarakat enggan berkomunikasi dengan Polisi.

Pelaksanaan Komunikasi Sosial ABRI.

Komunikasi Sosial ABRI adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan komunikasi oleh ABRI atau Polri untuk mempengaruhi masyarakat, kekuatan-kekuatan sosial untuk berpartisipasi terhadap keamanan, ketertiban masyarakat secara berlanjut dan dinamis. Sedangkan pelaksanaan daripada komunikasi ABRI adalah merupakan komunikasi yang bersumber dari ABRI/Polri, diteruskan kepada masyarakat melalui usaha-usaha memberi keterangan, pesan, laporan, informasi dan penerangan agar masyarakat dapat mengerti, memahami apa yang disampaikan dan memperoleh persesuaian pendapat di dalam bidang Kamtibmas.

Polri di lapangan adalah komunikator, masyarakat adalah komunikan dan komunikasi serta kemampuan berkomunikasi adalah metoda sehingga pesan-pesan dapat sampai kepada komunikan untuk bertindak sesuai yang diinginkan komunikator. Oleh sebab itu Kapolsek menggaris bawahi bahwa untuk pelaksanaan komunikasi sosial ABRI tersebut perlu diperhatikan 3 (tiga) faktor penentu sebagai berikut, yakni:

- Faktor Personil Polri Polsek Siak Hulu.
- Faktor Masyarakat sebagai Obyek.

– Faktor Kemampuan Berkomunikasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi masyarakat Siak Hulu ditentukan oleh pendidikan masyarakat, pergaulan di dalam berintegrasi dengan masyarakat lainnya, dan bahasa yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan-pesan.

Dalam kaitan ini penulis mengidentifikasi ada dua golongan masyarakat yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi tersebut, yaitu:

- Masyarakat yang hidup di desa-desa pedalaman/jauh dari kota.
- Masyarakat yang hidup di pedesaan yang berdekatan dengan kota.

Kedua golongan tersebut mempunyai potensi serta kendala berkomunikasi masing-masing sesuai karakteristiknya. Dan kendala berkomunikasi masyarakat di pedesaan yang jauh dari kota lebih besar daripada yang berdekatan dengan kota.

Koptu Inafri selaku Pembina

Desa di Kasikan menyatakan bahwa faktor pendidikan (mayoritas umur 30 ke atas penduduk Desa Kasikan tidak pernah berpendidikan formal) dan bahasa (hanya sekitar 30% saja penduduk pedesaan dapat berbahasa Indonesia) merupakan kendala komunikasi terbesar. Hal tersebut dikuatkan oleh

Kepala Desa Kesikan, Nurdin Sani. Kendala berkomunikasi berbahasa Indonesia tersebut menambah kerawanan dalam meleraai/mencegah kebiasaan mabuk akibat minum minuman keras sebagai ekspresi kegembiraan sehabis menerima rezeki panen kelapa sawit yang semakin hari semakin menembus pedesaan tersebut.

Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang berdekatan dengan kota seperti Desa Tangkerang, Desa Labuhbaru, Desa Rejosari, dan Desa Tampan, yang 40% penduduknya mencari nafkah ke kota Pekanbaru. Komunikasi untuk menciptakan Kamtibmas yang stabil relatif lebih mudah, dan dilakukan dengan cara sebagai berikut: Komunikasi Langsung Antar Pribadi, dengan sasaran utama: Ketua-ketua RK/RT, Tokoh Organisasi Buruh, Alim-ulama dan Pemuka Agama serta Tokoh Masyarakat yang disegani, para Pendidik, Pimpinan Instansi Pemerintah dan Swasta, dan sebagainya. Komunikasi dalam bentuk ceramah-ceramahpun dilakukan, dengan sasaran: Organisasi Pemuda cq. Karang Taruna-Pramuka-Organisasi Olahraga dan Bela diri-Remaja Mesjid-AMPI-Koperasi Pemuda Tani, Organisasi Wanita cq. Bhayangkari-Dharma Wanita Unit Desa dan sebagainya.

Pelaksanaan Komunikasi Sosial dalam Mendukung Kamtib di Desa.

Merujuk amanat Pangab/Pang-kopkamtib dengan judul "Meman-

tapkan Stabilitas Keamanan di Pedesaan" tanggal 23 Agustus 1985 berikut 4 (empat) butir intinya, maka melihat peranan penting Siak Hulu sebagai penunjang potensi kehidupan perkotaan Pekanbaru maka telah diadakan upaya-upaya sebagai berikut.

Pertama, menetralsir dan tidak membiarkan desa menjadi lahan subur bagi lahirnya gejala sosial.

Kedua, secara aktif masyarakat diajak untuk mengenali, menghayati dan mewaspadai sumber-sumber ancaman potensi/potensial yang ada dalam masyarakat.

Wujud nyata yang dihasilkan adalah berhasil digalakkannya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), kegiatan pemuda dan masyarakat melalui Hansip/Wanra, mengaktifkan kegiatan RT/RK, dan lain-lain kegiatan fisik lainnya yang memiliki daya tangkal tinggi atas ancaman gejala sosial. Penggalakan-penggalakan tersebut berakumulasi ke dalam pelembagaan dan peran aktif masyarakat untuk melaksanakan pengamanan swakarsa. Wujud lain oleh kekuatan sosial politik selain ABRI/Polri telah pula dilembagakan adanya:

Koran masuk desa, upaya penerangan/informasi pedesaan oleh Deppen/TV-RI yang memberikan dampak positif dengan penambahan pengetahuan serta cakrawala pengetahuan masyarakat terhadap lingkungannya. Kedua media massa tersebut amat memegang peranan

dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi apapun demi stabilitas Kamtibmas pada khususnya.

Peranan Komunikasi Sosial di dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat.

Peranan komunikasi sosial antara Polri dengan masyarakat dalam proses pengoperan pesan/informasi akan menjalin pengertian antara kedua unsur tersebut secara terbuka, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab. Obyektivitas tersebut pada saatnya akan membuahkkan saran pendapat yang jujur serta kritik yang konstruktif. Kondisi demikian itu akan melahirkan rasa percaya-mempercayai yang dalam komunikasi sosial akan melahirkan keterbukaan dan mendorong kesadaran berpartisipasi.

Keberhasilan komunikasi sosial terlibat pada saat pengembangan pembangunan nasional di sektor jalan raya merambah Siak Hulu pada tahun 1983 di mana kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan nampak bertentangan. Maka dengan pendekatan-pendekatan langsung antar pribadi dan pemberian informasi tentang maksud baik demi kepentingan bersama di masa depan, tidak hanya diperoleh partisipasi semu saja melainkan telah berubah menjadi partisipasi yang menghilangkan segala prasangka yang pernah lahir sebelumnya. Di sinilah letak pentingnya persiapan penyampaian pesan itu dilakukan dengan per-

sosial sentris ini tidak terlihat adanya benang-benang dengan warna-warna yang jelas: mana 5 (lima) unsur penentu komunikasi sosial yang terdiri dari (1) Pesan/idea, (2) Komunikator/Polri, (3) Metoda/sarana/wahana, (4) Komunikan/Masyarakat Siak Hulu, dan (5) Sasaran yang hendak dicapai. Dari lima unsur penentu tersebut penulis telah mencoba mengangkat Komunikator dan Komunikan sebagai kunci penentu keberhasilan, akan tetapi karena rincian "strength-weaknessopportunity-threat" tidak tajam atas kedua unsur tersebut maka pemilihan metoda yang rincipun menjadi meraba-raba. Kalau saja bab II di analisis berdasarkan kondisi statis (Trigatra) dan dinamis (Pancagatra) dari Ketahanan Nasional, maka akan dapat dipertajam bahwa dampak-dampak kesejahteraan (prosperity) serta keamanan (security) sebagai akibat perkembangan pembangunan nasional di Siak Hulu, ternyata dapat ditanggulangi dan dibina dengan pendayagunaan penerapan komunikasi sosial.

Berkali-kali ABRI/Polri diketengahkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, akan tetapi penulis melupakan pegangan Polri un-

tuk menerapkan "Tujuh Asas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial ABRI" yang berakumulasi pada butir ke-7, yakni persuasif. Dalam butir itulah justru terletak hakekat makna pembinaan, yakni membuat orang lain sadar dan mengerti pesan Polri, dan menjadikan pesan berikut tujuan atau sasaran pesan itu sebagai keyakinan/tanggung jawabnya untuk di suksekan.

Kunci-kunci pas dan senjata pamungkas Ilmu Komunikasi Sosial belum diangkat dengan tajam, untuk menjawab tantangan yang berkembang tahun 90-an yakni keharusan tampilnya potensi-potensi Supra dan Infra Struktur Penanggulangan Gangguan Kamtibmas yang komprehensif. Dan kalaupun ada/sudah diangkat, apa yang disajikan untuk Kecamatan Siak Hulu, dapat diberlakukan pula untuk kecamatan-kecamatan yang setingkat tanpa harus meningat karakteristik wilayahnya. Dengan demikian analisis penulis secara mikroskopis masih belum dipaparkan secara tajam sebagaimana diharapkan Garbha Wiyata Luhur Bha-yangkara (PTIK).



SEGERA TERBIT

**PUSAT PENGEMBANGAN
ILMU DAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
TELAH MENERBITKAN :**

1. Kamus istilah Kepolisian
2. Kamus kata-kata dasar bahasa Inggris yang bersangkutan dengan Ilmu Kepolisian
3. Himpunan akronim Kepolisian R.I.
4. Petunjuk praktis berbicara efektif dalam pertemuan ilmiah dan menulis yang baik dalam karya ilmiah.

Peminat dapat menghubungi :

PPITK-PTIK

Jl. Tirtayasa Raya No. 6

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Telp.: 772234

770807